

**Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1  
Bolaang Mongondow Timur**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk diseminarkan dalam sidang Skripsi pada program studi  
Manajemen Pendidikan Islam

Oleh :

**Gisty Ananda Mamonto**

NIM : 20224001



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO  
1447 H / 2025 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gisty Ananda Mamonto  
NIM : 20224001  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIN 1 Boltim

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Manado, 02 Juli 2025  
Penulis



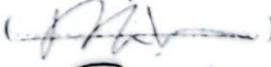
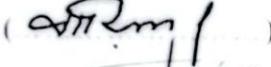
Gisty Ananda Mamonto  
NIM. 20224001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIN 1 Boltim**" yang disusun oleh **Gisty Ananda Mamonto, NIM: 20224001**, mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 02 Juli 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dengan beberapa perbaikan.

Manado 02 Juli 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua	Dr. Feiby Ismail, M.Pd	(  )
Sekretaris	Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd	(  )
Penguji I	Drs. Kusnan, M.Pd.	(  )
Penguji II	Irvan Kurniawan, M.Pd	(  )
Pembimbing I	Dr. Feiby Ismail, M.Pd	(  )
Pembimbing II	Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd.	(  )

Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan  
Ilmu Keguruan IAIN Manado



**Dr. Arhanuddin M.Pd.I**  
NIP. 198301162011011003

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk kehidupan, penjelas serta pedoman pembeda bagi hak dan yang bathil ialah Allah Subhanahu Wa'Ta'ala yang telah menyempurnakan Agama, dan telah memberikan nikmat kepada seluruh umat manusia di dunia.

Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia sempurna pilihan Allah SWT untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat manusia. Semoga berkah dan kemuliaan tercurahkan kepada beliau, keluarga, serta sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa sampai saat ini mengikuti ajaran sunnah beliau ajarkan.

Alhamdulillahhirabbil 'alamin penyusunan skripsi dengan judul **"Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur"** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat terakhir guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S,Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan namun karena banyak dukungan dari berbagai pihak terutama kepada kedua orang tua. Terima Kasih Ayah Ade Candra Mamonto, Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun Beliau mampu mendidik penulis yang keras kepala ini, terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pintu surgaku, Ibu Rita Dewi Mamonto, Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat,

dan doa yang diberikan selama ini, Terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang, bu.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Feiby Ismail, M.Pd., selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen pembimbing II Bapak Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd., yang telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal bimbingan sampai penyelesaian skripsi ini sehingga semua bentuk kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini bisa diatasi.

Penulis Juga sangat bersyukur dan berterimah kasih kepada Dosen Penguji yaitu Bapak Drs. Kusnan, M.Pd., dan Bapak Irvan Kurniawan, M.Pd., Yang telah memberikan saran dan arahan terbaiknya sehingga menjadikan penulis lebih baik dalam penyelesaian Skripsi. Selain itu dalam penyelesaian pendidikan S1 ini, tentu penulis mendapat berbagai fasilitas pendidikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Dr. Edi Gunawan, M.HI., selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Manado, Dr. Salma, M.HI., Selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Manado, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag., Selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Manado Yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bisa menempuh pendidikan di IAIN Manado.
2. Dr. Arhanuddin, M.Pd.I., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan, Dr. Adri Lundeto, M.Pd.I., Selaku Wakil Bidang 1 Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Dra. Nurhayati, M.Pd.I., Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ishak Wanto Talibo, M.Pd.I., Selaku Wakil Dekan III Kesiswaan dan Kerja Sama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Manado.

3. Dr. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd., Selaku Ketua Program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
4. Abdul Muis Daeng Pawero, M.Pd., selaku Sekertaris Program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
5. Seluruh Tenaga kependidikan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang telah membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
6. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado beserta stafnya yang telah banyak memberi bantuan baik kesempatan membaca di perpustakaan maupun melayani peminjaman buku literatur.
7. Dosen Penasehat Akademik Bapak Kudrat Dukalang, M.Pd., yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan. terlebih khusus dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan ilmu dan motivasi dan arahan selama perkuliahan.
9. Terima Kasih Kepada Ibu Nurman Asiari, S.Ag., selaku Kepala Madrasah beserta Bapak dan ibu Guru MIN 1 Bolaang Mongondow Timur yang telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti terlebih khusus pada Guru-guru yang telah dilakukannya wawancara dalam pelaksanaan penelitian.
10. Terima Kasih juga kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhaimin Rayan Saleh, S.Pd. Terima Kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
11. Kepada Sahabat-Sahabat penulis Dwi, Friska, Fibri, Vidia, Icha, Mufliha, Dinda Aulia, Dinda Husain, Nadya Imaniar, Khairiyyah Sari, Nadia Bachdar terima kasih atas segala dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih

selalu mendengarkan keluh kesah penulis. *See you on top, gays!*

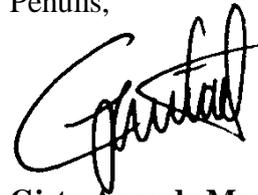
12. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Gisty ananda Mamonto atas kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Saya bangga pada diri saya sendiri untuk kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk menjadi lebih baik kedepannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca agar skripsi ini lebih baik. Dengan demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan saudara-saudara yang bisa dijadikan referensi lanjutan dalam melakukan penelitian. Semoga teman-teman semua mendapatkan keberkahan dalam membaca skripsi ini Aamiin.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terlebih bagi penulis sendiri. Dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, membimbing, memotivasi serta memberikan arahan kepada penulis. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*, selalu memberikan kekuatan, kesehatan, keberkahan, petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. *Aamiin Allahumma Aaamiin.*

Manado, 02 Juli 2025

Penulis,



**Gisty Ananda Mamonto**

NIM. 20224001

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	14
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10-33</b>
A. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan .....	10
B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan .....	12
C. Sumber Pembiayaan Pendidikan .....	14
D. Standar Pembiayaan Pendidikan .....	15
E. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan .....	16
F. Dana Bantuan Operasional Sekolah .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34-40</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	35
E. Instrumen Penelitian .....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Pengujian Keabsahan Data .....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41-59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Deskripsi Data Hasil Temuan Penelitian .....	43
1. Perencanaan Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 BOLTIM.....	44
2. Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .....	47
3. Pengawasan Dana BOS di MIN 1 Boltim .....	50
C. Pembahasan .....	56
BAB V PENUTUP .....	60-62
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
1. Perencanaan dana BOS .....	60
2. Pembukuan Dana BOS .....	61
3. Pengawasan dana BOS .....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Selesai Penelitian
3. Surat Keterangan Wawancara
4. Transkrip Wawancara
5. Lampiran Pedoman Observasi
6. Lampiran Penggunaan Dana BOS
7. Lampiran Dokumentasi
8. Profil Madrasah
9. Identitas Penulis
10. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

## **DAFTAR TABEL**

Gambar 1.1 BAB IV Diagram Kontek Perencanaan dana BOS MIN 1 Boltim .....	52
Gambar 1.2 BAB IV Diagram Konteks Pelaksanaan dana BOS di MIN 1 Boltim .....	54
Gambar 1.3 BAB IV Diagram konteks pengawasan dana BOS di MIN 1 Boltim .....	55
Gambar 1.4 BAB IV Struktur Tim Perumus Anggaran di MIN 1 Boltim .....	58
Gambar 1.5 BAB IV Struktur Tim Perumus Anggaran di MIN 1 Boltim .....	59

## ABSTRAK

Nama : Gisty Ananda Mamonto  
NIM : 20224001  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Judul : Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIN 1 Bolaang  
Mongondow Timur

---

Penelitian ini berjudul “ **Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIN 1 Boltim**” lokasi penelitian terletak di Jl. Trans Bongkudai- Ratahan, Bongkuai, Kec. Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan (Budgeting) Bantuan Operasional di MIN 1 Boltim, (2) Bagaimana Pembukuan (Accounting) Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 Boltim, (3) Bagaimana proses Pemeriksaan (*Auditing*) Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif. Subjek penelitiannya adalah Kepala Sekolah, Bendahara Bos Bendahara Komite. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Adapun hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses perencanaan dana BOS di MIN 1 Boltim diawali dengan diadakannya rapat baik secara internal maupun Tingkat dewan guru yang membahas tentang penyusunan RKAS dan RAB Bos Sekolah dan tahap selanjutnya, MIN 1 Boltim mengadakan sosialisasi dengan komite Sekolah untuk menyampaikan hasil rapat terkait penyusunan RKAS dan RAB Bos diajukan kepada pihak kantor. (2) Proses pembukuan dana Bos dilakukan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta laporan penggunaan dana Bos melalui portal Bos kemenag. (3) Proses pengawasan merupakan tolak ukur apakah rencana yang disusun telah berjalan baik atau justru sebaliknya, dalam pengawasan MIN 1 Boltim terdiri dari pengawasan secara internal maupun secara eksternal, dan masyarakat yang dalam hal ini diawasi langsung.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan Pendidikan. Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*

## ABSTRACT

Author's name : Gisty Ananda Mamonto  
Student ID Number : 20224001  
Faculty : Tarbiyah and Education Sciences  
Department : Islamic Education Management  
Thesis Title : Education Financing Management at MIN 1 Bolaang Mongondow East

---

This research is entitled "Education Financing Management at MIN 1 Boltim" the research location is located on Jl. Trans Bongkudai- Ratahan, Bongkudai, West Modayag sub-district, East Bolaang Mongondow district, North Sulawesi. The problems studied in this research are: (1) How is the planning (Budgeting) of Operational Assistance at MIN 1 Boltim, (2) How is the Bookkeeping (Accounting) of School Operational Assistance at MIN 1 Boltim, (3) How is the Auditing process of School Operational Assistance at MIN 1 East Bolaang Mongondow. The method used in this research is a qualitative method descriptive approach. The research subjects are the Principal, Boss Treasurer, Committee Treasurer. The data collection techniques are observation, interview, and documentation. Furthermore, data analysis techniques are: data reduction, data presentation, conclusion drawing. The results of this study show that (1) The planning process of BOS funds at MIN 1 Boltim begins with the holding of a meeting back internally and at the level of the teachers' council which discusses the preparation of RKAS and RAB Bos School and the next stage, MIN 1 Boltim held a socialization with the School committee to convey the results of the meeting related to the preparation of RKAS and RAB Bos submitted. (2) The process of accounting for Bos funds is carried out by recording all receipts and expenditures in the general cash book and reports on the use of Bos funds through the Ministry of Religious Affairs Bos portal. (3) The supervision process is a benchmark for whether the plan prepared has gone back or vice versa, in MIN 1 Boltim supervision consists of internal and external supervision, and the community which in this case is directly supervised.

**Keywords:** *Education Financing. Management of School Operational Assistance (BOS)*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.

Sebuah lembaga pendidikan yang sukses tidak lepas dari sokongan biaya pendidikan yang tinggi pula, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi dan mahal biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut dan mampu menghasilkan lulusan lulusan yang bermutu dengan hasil belajar yang tinggi. Sepertinya akan sulit merealisasikan mutu pendidikan yang baik apabila tidak didukung oleh biaya pendidikan yang tinggi pula. Oleh karenanya biaya pendidikan memiliki peranan penting.<sup>1</sup>

Sementara itu, pendidikan nasional kita dihadapi kepada masalah antarlain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orangtua.

Menurut Akdon, biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antarlain besar kecilnya sebuah institusi, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, rasio siswa berbanding guru dan dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian atau

---

<sup>1</sup>Nanang Fattah, "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan" (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), h.77.

pendapatan.<sup>2</sup>

Di Indonesia, peran pemerintah dalam membantu pembiayaan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 amandemen ke-4 menyatakan bahwa, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang sangat berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu indikator tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan.

Komponen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan termasuk komponen yang sangat penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar- mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Hal ini terlihat dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna mencapai tujuan pendidikan.<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparans, dan akuntabilitas publik.<sup>5</sup> Dalam suatu konsep keuangan yang akan diimplementasikan atau diterapkan memiliki berbagai istilah yaitu sebagai berikut.

1. Keuangan (*Finance*). Berdasarkan definisi yang luas, konsep keuangan merupakan bagian dari kegiatan praktis yang berkaitan dengan uang.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Akdon, dkk “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*” ,(Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2017), h 9

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3 Amandemen ke-4

<sup>4</sup> Opan Arifuddin, ”*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*”,2016

<sup>5</sup> Rita Purvitasari and Mutkhamad Sukur, “*Manajemen Keuangan Sekolah dalam pemenuhan sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)*,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol.04, no 01 (2020) : h 95.

<sup>6</sup> Brigham Eugene and Houston Joel, “*Dasar-dasar Manajemen Keuangan*” (Jakarta : Salemba Empat, 2018).

2. Anggaran (*Budget*). Anggaran adalah rencana operasional yang diterapkan secara kuantitatif yang digunakan sebagai pedoman untuk fungsi suatu lembaga. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan anggaran sekolah yaitu: penilaian terhadap rencana kegiatan; saat menyetujui rencana kerja, penting untuk menggunakan anggaran sekolah dalam pemantapan rencana kerja, serta berguna untuk mengetahui perbedaan biaya dan estimasi pendapatan.
3. Biaya (*Cost*). Biaya baik langsung maupun dana yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu negara, masyarakat dan orang tua digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan. Dalam melakukan perhitungan biaya pendidikan sangat ditentukan berdasarkan komponen fungsional, yaitu kegiatan pelatihan, yang terdiri dari pengadaan sarana prasarana pendidikan.
4. Pembiayaan (*Financing*). Pembiayaan adalah fungsi mengalokasikan uang untuk melakukan usaha. Pendanaan terkait pendidikan justru merupakan dana yang mendukung proses belajar mengajar atau proses pelaksanaan berbagai program pendidikan.<sup>7</sup>

Akan tetapi, kelemahan mendasar pendidikan saat ini terletak pada bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah. Ketersediaan anggaran dan dana tidak selamanya berbanding lurus dengan tercapainya tujuan pendidikan. Karena pada beberapakasus terdapat penyalahgunaan anggaran dana BOS. Penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan merupakan indikasi bahwa dana BOS perlu dikelola dengan baik dan profesional. Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelola keuangan di sekolah perlu dilatih untuk menerapkan manajemen pembiayaan, sebab hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mintarisih Danumiharja, "*Manajemen Keuangan Sekolah ; Studi Manajemen pada SLTP Dalam Implementasi Otda*" (Jakarta : 2013).

<sup>8</sup> Ismail Feiby, "*Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri Bitung, Sulawesi Utara, 5*

Institusi pendidikan di Indonesia mendapat dukungan dari pemerintah pusat kegiatan belajar mengajar dalam bentuk hibah. Bantuan ini diberikan langsung ke sekolah dan sekolah memiliki kompetensi penuh untuk merencanakan dan melaksanakan manajemen bantuan. Bantuan negara ini dikenal dengan nama Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu program pemerintah yang mendukung program tersebut wajib belajar 12 tahun.

Dana BOS harus dikelola sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS dialokasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS. Bantuan operasional sekolah dikelola oleh sekolah pelaksana manajemen berbasis sekolah (MBS) yang menyediakan kebebasan dalam merencanakan, mengelola program yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah.<sup>9</sup> Adapun yang bertanggung jawab terhadap dana BOS di Sekolah adalah Kepala sekolah, Bendahara, Komite Sekolah dan Guru.

Seperti yang disampaikan penulis diatas, bahwa anggaran keuangan sangat penting untuk bisa dikelola dengan baik dan maksimal, oleh sebab itu manajemen hadir untuk bisa mengatur secara keseluruhan proses pembiayaan anggaran pendidikan agar bisa teralokasikan dengan baik pada setiap aspek pendidikan. Hal ini menjadi sangat mendesak, karena sebuah harapan menciptakan suatu generasi terbaik, harus dimulai dari pemberian fasilitas yang layak, dan kemudian sebuah proses pembiayaan pendidikan menjadi salah satu kendaraan menuju generasi terbaik.

Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu, yang secara singkat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan suatu madrasah/sekolah. Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam pembelajaran, Maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan

---

(2020).1-18.

<sup>9</sup> Alya Erita Sijoen, s.R. "Analisis efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), (Kota Kupang, Sekolah Dasar Negeri Banipol" 2 : 2020), Vol.2 No.3

pendidikan. tata kelola ini disebut dengan manajemen pembiayaan/keuangan.<sup>10</sup>

Manajemen dalam pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. hampir tidak ada upaya pendidikan yang mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct Cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi disekolah, misalnya biaya hidup peserta didik, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, biaya kesehatan.<sup>11</sup>

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur merupakan lembaga pendidikan islam tingkat dasar yang dinaungi oleh Kementrian agama Republik Indonesia yang terletak di desa Bongkudai Kec.Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan perkembangan yang ada MIN 1 Boltim banyak sekali pencapaian yang diraih oleh mereka yang melibatkan peserta didik untuk ikut dalam ajang kopetensi. Seiring dengan perkembangan tersebut secara signifikan MIN 1 Boltim dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) mengalami kemajuan pada peserta didik baru. Sekolah ini berada di daerah pedesaan dengan latar belakang yang beranekaragaman serta kepedulian masyarakat yang tinggi untuk memajukan pendidikan . Dalam konteks ini Bantuan Operasional Sekolah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa dalam proses manajemen sekolah.

Dengan kiat-kiat tersebut, penulis melakukan sebuah observasi awal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur untuk mengetahui sebuah proses pengalokasian pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dalam hal ini pengelolaan dana pengembangan sekolah belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan adanya Ketimpangan Jumlah siswadan Prasarana yang ada pada

---

<sup>10</sup> Pendidikan yang Bermutu, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan*”, 20 (2017), h. 119,45.

<sup>11</sup> Feiby Ismail, dkk., “*Manajemen Pendidikan Islam*” (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), h. 102-103.

sekolah tersebut, yang dimana jumlah siswa pada sekolah ini berjumlah 330 siswa sedangkan Prasarana (toilet) hanya berjumlah 3 buah. MIN 1 Boltim berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan segala sesuatu yang dapat menunjang proses pembelajaran secara optimal kepada peserta didik. Untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang proses pembelajaran tentunya diperlukan dukungan dari berbagai finansial agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari pembiayaan Madrasah lebih khususnya pada pembiayaan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.<sup>12</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur”.

## **B. Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini dilakukan di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur yang bertempat di desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur, maka peneliti memfokuskan masalah pada pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah yang meliputi pertimbangan, dan penggalangan dana, pengawasan pelayanan pendidikan, dan penindak lanjuti. Kemudian efektivitas anggaran yang akan diteliti meliputi input, proses dan output. Fokus penelitian disini merupakan Batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang akan diteliti.

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memperjelas focus penelitian diatas maka peneliti mencoba menggambarkan objek yang akan diteliti sehingga menjadi deskripsi focus dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>12</sup> Nurman Asiari, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur, Wawancara, Bongkudai, 12 Februari 2024.

a. Perencanaan (*Budgeting*) Dana Bantuan Operasional Sekolah

Perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Dengan adanya tahap ini lembaga pendidikan dapat memberikan perubahan atau tujuan yang lebih baik.<sup>13</sup>

b. Pembukuan (*Accounting*) Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pembukuan (*Accounting*) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Pengurusan ini dikenal dengan istilah pengurusan ketatausahaan, pengurusan kedua menyangkut tindak lanjut dari urusan pertama yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan, dan dikenal dengan istilah pembendaharawan.<sup>14</sup>

c. Pemeriksaan (*Auditing*) Dana Bantuan Operasional Sekolah

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk menganalisa terjadinya kekliruan atau penyimpangan dalam proses pelaksanaan program kerja supaya dapat segera mendapatkan penanganan dan tindakan pembenahan. Dengan adanya tahapan ini dapat diketahui keuntungan dan kerugian dari program yang dibuat.<sup>15</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan di kaji dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana Perencanaan (*Budgeting*) Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur ?

---

<sup>13</sup> Feiby Ismail, dkk., *Manajemen Pendidikan Islam* ( Bandung: Media Sains Indonesia,2021), h. 8.

<sup>14</sup> Arwildayanto, Nina Lamatenggo, and Wami Tune Sumar, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, 2022, CX.

<sup>15</sup> Aulia Riski, '*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*', *Universitas Negeri Padang*, 2018, h. 1-8.

2. Bagaimana Pembukuan (*Accounting*) Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur ?
3. Bagaimana proses Pemeriksaan (*Auditing*) Bantuan Operasional Sekolah di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah proses manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur.

1. Untuk Mendeskripsikan pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur.
2. Untuk Mendeskripsikan Pembukuan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur.
3. Untuk Mendeskripsikan Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi penulis maupun pembaca dalam peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang pentingnya manajemen Pembiayaan Pendidikan.
2. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa yang melakukan penelitian di bidang manajemen pembiayaan pendidikan.
3. Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang secara praktis dan bermanfaat bagi lembaga, instansi pemerintah, maupun bagi umum yang memerlukan pemikiran tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

## F. Definisi Operasional

Penelitian ini akan mengkaji tentang Manajemen Pembiayaan pada MIN 1 Bolaang Mongondow Timur. Maka definisi operasional dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manajemen

Secara Etimologi Manajemen berasal dari kata kerja “*To Manage*” yang berarti mengatur. Sedangkan dalam bahasa latin *management* berasal dari kata “*managere*” terdiri dari dua kata yaitu *Manus* dan *Agere*. *Manus* berarti tangan dan *Agere* berarti melakukan atau melaksanakan.<sup>16</sup>

Manajemen menurut Stooner, dkk, sebagaimana yang dikutip oleh Wilson Bangun mendefinisikan bahwa manajemen merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.<sup>17</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwa manajemen adalah kemampuan untuk mengatur segala sesuatu yang dilakukan seseorang atau kelompok agar dapat tersusun secara sistematis dalam mencapai target yang diinginkan bersama.

### 2. Pembiayaan pendidikan

Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan untuk mendukung penanaman modal yang direncanakan, baik secara individu maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.<sup>18</sup> Jadi, Pendanaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat menunjang keefektifitas dan efisien pengelolaan pada suatu lembaga.

Pembiayaan pendidikan adalah komponen yang sangat penting serta tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah.

---

<sup>16</sup> Eni, *Islamic Education Management, Angewandte Chemie International Edition*, 6 (11), 951–952., 2020.

<sup>17</sup> Wilson Bangun, *Intisari Manajemen* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 3.

<sup>18</sup> Dinda Fitri Monita, ‘*Pembiayaan Dalam Pendidikan*’, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, 1–6.

Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengeloladana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai.<sup>19</sup>

### 3. MIN 1 Bolaang Mongondow Timur

MIN 1 Bolaang Mongondow Timur merupakan madrasah yang berada di jln. Raya Bongkudai Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur adalah sebuah Lembaga pendidikan tingkat dasar yang memiliki ciri khas mengenai kedisiplinan pendidik maupun peserta didik untuk MIN 1 Bolaang Mongondowow Timur dipandang sangat baik oleh masyarakat sekitar dan menjadi sekolah pilihan karena ketersediaan program – program pendidikan yang bertujuan untuk merubah peserta didik yang berilmu, cakap, kreatif, bermutu dan berkarakter.

---

<sup>19</sup> Dinda Fitri Monita, 'Pembiayaan Dalam Pendidikan', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2020, h. 1–6.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, yang diatur semua yang berkaitan dengan unsur- unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, material, machines, dan market*. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi- fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen adalah proses untuk mengoptimalkan segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang ditetapkan dengan usaha yang dilakukan agar dapat mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan bagi seorang pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam sudut pandang islam manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata *Al -Tadbir* (pengaturan). Kata ini derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) yang banyak terdapat dalam al-Qur'an seperti Allah SWT.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝

Terjemahan: “*Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya, pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu*”. (QS. As-Sajdah:5).<sup>22</sup>

*Al-Zamahsyari* menjelaskan dalam tafsirnya *al-Kasyaf* bahwa Allah

---

<sup>20</sup> Malayu Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h. 1.

<sup>21</sup> Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 109.

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an & Terjemahan*, (Surabaya : PT.Hallim, 2020).

mengatur segala perkara dari langit ke bumi dan mengembalikannya kepada-Nya dalam satu hari akhir dunia. Satuan “1.000 tahun” Bukan 1.000 tahun harfiah; untuk menggambarkan besar dan beratnya hari ketika semua urusan selesai sampai perjalanan wahyu serta intervensi ilahi yang melampaui dimensi waktu manusia.<sup>23</sup>

Biaya pendidikan menjadi faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan baik. Karena pada dasarnya tujuan manajemen pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya untuk pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan pembiayaan pendidikan, pengawasan pembiayaan pendidikan.<sup>24</sup>

Pendanaan pendidikan merupakan Faktor yang sangat penting dalam pembangunan sistem pendidikan secara keseluruhan. Segala kegiatan pembelajaran memerlukan biaya, sehingga dalam meningkatkan kinerja sistem pendidikan pengelolaan anggaran tidak boleh dibiarkan begitu saja, mengingat anggaran tentu menunjang kegiatan tersebut. Tidak semua masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa belanja pendidikan yang memadai dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan, meskipun tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas. Penganggaran merupakan landasan yang mendasar dalam bidang pendidikan, karena anggaran merencanakan kompleksitas biaya yang berkaitan dengan biaya sarana dan prasarana, gaji guru dan biaya pembelajaran. Oleh karenanya, setelah seluruh biaya pelatihan terpenuhi, semua kebutuhan penting secara otomatis terpenuhi.

Pengelolaan dana pendidikan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sistem dana pendidikan negara.

---

<sup>23</sup> Al-Imam Abi al-Qosim Jarillah Mahmud bin ‘Umar bin Muhammad Al-Zamahsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, n.d.

<sup>24</sup> Siti Fatimah, “Pembiayaan Pendidikan Berbasis Umat,” *Al-Idarah Jurnal Kependidikan Islam*, vol. 3 no. 198. (2012).

Terkadang program kegiatan keuangan mencakup 3 hal: penyusunan anggaran (*budgeting*), Pembukuan (*accouting*), Pemeriksaan (*controlling*).<sup>25</sup>

Proses keluar masuknya keuangan menjadi hal terpenting dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga dapat membentuk model efektivitas anggaran yang sesuai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pendidikan merupakan suatu proses kerja sama antara individu serta pengelolaan dana pembelajaran sebagai sarana demi terjaminnya keberlangsungan pendidikan.

## **B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan**

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk menjamin kualitas pengelolaan keuangan pendidikan. Pasal 48 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan yakni dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa adanya perbedaan latar belakang ekonomi, status sosial, jenis kelamin bahkan perbedaan lain termasuk SARA. Selain itu terdapat asas efisiensi yaitu mengutamakan mutu pelayanan, kepentingan dan tersedianya pelayanan pendidikan yang berdaya saing. Dalam pengelolaan dana pendidikan juga harus berpegang pada prinsip transparansi, yang memungkinkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya keuangan serta terpenuhinya unsur tata kelola pemerintah dan penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Pengelolaan dana pendidikan juga harus mengikuti prinsip akuntabilitas yang berarti kemampuan pihak pengelola dana dalam hal ini lembaga pendidikan dalam mempertanggung jawabkan dana pendidikan yang dikelolanya. Pihak terkait dinilai apakah dana pendidikan telah tepat digunakan sesuai rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Prinsip akuntabilitas ini memungkinkan pihak di luar lembaga pendidikan untuk mengontrol penggunaan anggaran pendidikan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip efektivitas, yaitu

---

<sup>25</sup> Tatang M. Amirin, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011).

kesesuaian antara peraturan kegiatan pendanaan dengan pembiayaan pendidikan untuk terselenggaranya perencanaan pendidikan. Efektivitas pengelolaan sumber daya pendidikan juga berdampak pada kemampuan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

Selain itu prinsip efisiensi juga harus ditekankan. Berikut ini menjelaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

a. Transparansi

Transparansi berarti keterbukaan. Transparansi pada bidang manajemen berarti keterbukaan dalam mengelola kegiatan. Pada lembaga pendidikan bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya pendanaan, rincian penggunaan dan pelaporan harus jelas untuk memudahkan pihak yang terlibat. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap program pendidikan di semua sekolah. Selain itu, transparansi dapat membangun rasa saling percaya antara pemerintah, masyarakat, orang tua, siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan keadaan seseorang dimana orang lain menilai kualitas kerjanya dalam tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaporan dalam manajemen keuangan artinya penggunaan dana sekolah dapat dilaporkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku saat ini, sekolah menggunakan uang tersebut secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

c. Efektivitas

Efektivitas seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang

---

<sup>26</sup> Feiby Ismail, *Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung , Sulawesi Utara*, 5 (2020), h. 1-18.

ditentukan. *Garner* mendefinisikan lebih dalam, arena sebenarnya efektifitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, namun tercapai hasil yang berkualitas yang berkaitan dengan terciptanya visi lembaga.

d. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau daya dan hasil.

Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Hal ini dapat dilihat dua hal berikut:

- 1) Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. Ragam efisiensi dapat dijelaskan melalui hubungan antara penggunaan waktu, tenaga, biaya dan hasil yang diharapkan.
- 2) Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam penggunaan waktu, tenaga, biaya tentu memberikan hasil sebanyak banyaknya baik kualitas maupun kuantitas.<sup>27</sup>

### C. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Menurut *Nanang Fattah*, sumber dana pendidikan adalah pihak- pihak yang memberikan bantuan subsidi dan sumbangan yang diterima secara teratur. Sumber dana tersebut antara lain dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), orang tua murid, dan masyarakat. Sumber dana dari pemerintah pusat terdiri dari gaji, subsidi, dan Dana Operasional Perawatan (DOP).

---

<sup>27</sup> Anggi nopita sari, “*Manajemen pembiayaan pendidikan di Madrasah Aliyah Baitul Kirom Lampung Selatan*”. Skripsi (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UNIVERSITAS Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). h. 16.

Adapun sumber dana pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pasal 46 ayat 1 berbunyi “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”.<sup>28</sup>Pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah pusat yang memberikan dana kepada sekolah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pemerintah daerah. Sedangkan masyarakat yaitu orang tua atau wali peserta didik. Dana yang bersumber dari masyarakat biasanya berupa sumbangan sukarela dari anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu sekolah.<sup>29</sup>

#### **D. Standar Pembiayaan Pendidikan**

Yang disebut sebagai standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang diperlukan sebuah satuan pendidikan agar dapat melaksanakan kegiatan pendidikan selama satu tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasional dan biaya personal.

##### **a. Biaya operasional**

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari antara lain sebagai berikut.

- 1). Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- 2).Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
- 3).Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.

##### **b. Biaya personal**

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transport, buku, konsumsi, dan akomodasi.

---

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang*, h 30.

<sup>29</sup> Nan Rahminawati, *Manajemen Pendidikan, Manajemen Pendidikan*, 2023

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber dayamanusiadan modal kerja tetap. PP ini diperkuat dengan PP 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, dimana biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. PP No 48 tahun 2008 ini sifatnya melengkapi dan mengukuhkan PP No 19 tahun 2005 tersebut, karena PP No 48 tahun 2008 memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap PP No 19 tahun 2005 tentang pendanaan pendidikan.<sup>30</sup>

#### **E. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen yang berasal dari bahasa Inggris dan kemudian di Indonesia menjadi manajemen. Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Pengelolaan Kelas dan Siswa” bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

- a. Perencanaan (*Planning*), menentukan apa yang harus terjadi di masa depan, pembentukan rencana kegiatan.
- b. Pelaksanaan (*actuating*), menggerakkan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Pemantauan (*controlling, monitoring*), memeriksa proses disbanding rencana, melakukan modifikasi rencana dan kegiatan.

---

<sup>30</sup> Rida Fironika, ‘Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, (2015), h. 43–64

*Planning* (Perencanaan), adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif. Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

*Actuating* (Pelaksanaan), adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan selesai dan disetujui oleh semua komponen yang terlibat, dan menghasilkan sebuah Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik (eRKAM), tahapan manajemen selanjutnya yaitu pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Kegiatan pelaksanaan pembiayaan madrasah meliputi dua kegiatan besar yakni penerimaan dan pengeluaran keuangan madrasah/sekolah. Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoritis

maupun peraturan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan berupa: Penerimaan Biaya Pendidikan dan Pengeluaran Biaya Pendidikan.

*Evaluating, monitoring* (Evaluasi, Pemantauan), pendidikan juga diartikan dengan proses untuk memberikan kualitas yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses melakukan evaluasi mungkin saja berbeda sesuai persepsi teori yang dianut, ada bermacam-macam cara. Namun evaluasi harus memasukkan ketentuan dan tindakan sejalan dengan fungsi evaluasi, yaitu:

- 1) Memfokuskan evaluasi.
- 2) Mendesain evaluasi.
- 3) Mengumpulkan informasi.
- 4) Menganalisis informasi.
- 5) Melaporkan hasil evaluasi.
- 6) Mengelola evaluasi dan mengevaluasi evaluasi.<sup>31</sup>

## **F. Dana Bantuan Operasional Sekolah**

### **a. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sebagaimana tertuang dalam PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>32</sup> Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan disusun dalam rencana kerja beserta aturan-aturan pelaksanaannya. Dengan adanya dana BOS diharapkan dapat mensukseskan pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas. Dalam biaya pendidikan

---

<sup>31</sup> Aulia Riski "*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*" h.11-13

<sup>32</sup> Syunu Trihantoyo, *Manajemen Keuangan Pendidikan* (Surabaya: Pustaka Aksara, 2020).

dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- i. Biaya satuan pendidikan merupakan biaya untuk penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
  1. Biaya Investasi adalah biaya yang digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
  2. Biaya Operasional memiliki dua bagian yaitu biaya personalia dan biaya non personalia. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan- tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan biaya nonpersonalia merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan habis pakai, biaya tidak langsung berupa air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, transportasi, konsumsi, pajak, uang lembur dan lain-lain.
  3. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dalam membiayai pendidikan.
  4. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
  5. Biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan adalah biaya pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
  6. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran.<sup>33</sup>

Pihak yang memiliki tugas dan menjadi kunci bagi keberhasilan program bantuan dana BOS adalah pihak sekolah. Proses pengusulan siswa

---

<sup>33</sup> Manajemen Keuangan and others, 'Journal of Educational Management and Strategy (JEMAST) Informasi Artikel A B S T R A K', *Journal of Educational Management and Strategy (JEMAST)*, 01.02 (2022), 125–33.

yang menerima dana BOS dihimpun dari tingkat sekolah, kemudian mulai dari penyaluran hingga pemanfaatan menjadi tanggung jawab sekolah. Penggunaan dana BOS digunakan berdasarkan RAPBS yang telah disusun antara pihak sekolah dan orang tua dalam forum komite. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara nasional dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dengan penanggung jawab Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Dana BOS diharapkan akan menjadi salah satu sumber pendanaan operasional siswa dalam melakukan kegiatan belajar dapat teratasi. Pengalokasian dana BOS untuk setiap provinsi disalurkan pada masing-masing sekolah melalui Dinas/Kanwil tingkat provinsi berdasarkan data siswa aktif. Dana yang diterima tiap sekolah menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah dalam penggunaannya. Dalam penggunaan dana BOS perlu adanya pengawasan yang terpadu, karena dengan banyaknya sekolah maka kontrol terhadap penggunaan dana BOS menjadi kunci keberhasilan program ini.

#### **b. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah**

Sebelum adanya program rintisan wajib belajar 12 tahun, pemerintah mulanya mengeluarkan kebijakan wajib belajar 6 tahun, selanjutnya program wajib belajar 9 tahun hingga saat ini muncul kebijakan baru guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni rintisan program wajib belajar 12 tahun. Wajib belajar 9 tahun bukan semata-mata untuk pencapaian angka partisipasi dalam pendidikan, tetapi untuk meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa. Oleh sebab itu yang harus dicapai oleh wajib belajar 9 tahun bukan sekedar angka partisipasi tetapi pendidikan dasar yang memiliki kualitas tertentu. Salah satu program yang diharapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu adalah program BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar 9 tahun yang bermutu.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi Dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan untuk tata kelola, kuntabilitas, dan pencitraan publik. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin pada tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Melalui program BOS yang terkait dengan pendidikan dasar 9 tahun setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.
- 2) BOS harus memberikan kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam atau alat tulis sekolah dan biaya lainnya.
- 3) BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP.
- 4) Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB.
- 5) Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah.
- 6) Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
- 7) BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak

mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

Dalam program BOS dan diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan 39 melibatkan dewan guru dan komite sekolah tanpa intervensi dari pihak lain.

### **c. Sasaran Program BOS Dan Besar Bantuan**

Program BOS memiliki sasaran semua sekolah tingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah, madrasah, pondok pesantren (Ponpes) dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan yang berbeda setiap tingkatannya. Dalam Permendikbud No. 8 Tahun 2020 sekolah sebagai sasaran penerimaan dana BOS yaitu:

1. Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp. 900.000 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp. 1.100.000 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp. 1.500.000 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp. 1.600.000 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.
5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Luar Biasa (SLB) sebesar Rp. 2.000.000 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.

Semua sekolah negeri dan swasta yang ada di Indonesia berhak memperoleh dana BOS yang memiliki izin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah, madrasah, ponpes yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perijinan pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan. Jumlah dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.

Setiap sekolah yang sudah menyatakan menerima dana BOS dibagi menjadi 2 kelompok dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Apabila di setiap sekolah terdapat siswa miskin maka sekolah wajib membebaskan segala jenis sumbangan untuk seluruh siswa miskin jika dana BOS masih tersisa bisa digunakan untuk mensubsidi siswa yang lain. Dengan demikian sekolah menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas, apabila seluruh siswa tergolong miskin dan seluruh biaya kebutuhan terpenuhi maka otomatis sekolah tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan gratis.
- 2) Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa sehingga dapat mengurangi sumbangan yang ditentukan.

Penggunaan dana BOS di sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan RKAS/RAPBS disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Pengalokasian dana BOS di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah dengan ketentuan bahwa dana BOS bisa digunakan pada kegiatan dan kebutuhan sekolah diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru yaitu mulai dari biaya pendaftaran, fotocopy, konsumsi panitia, dan lain-lain.
- 2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 4) Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, transport, dan lain-lain).
- 5) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misal untuk honor dan fotocopy).
- 6) Pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, pensil, spidol, kertas, dan lain-lain untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.

- 7) Pembiayaan langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan lain-lain). Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik maka diperbolehkan untuk membeli genset.
- 8) Pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor dan lain-lain, serta perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- 9) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Bagi sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- 10) Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
- 11) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang memiliki masalah biaya transportasi. Jika dinilai lebih ekonomis dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, mobil, dan lain-lain).
- 12) Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS.
- 13) Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum satu set untuk SD dan dua set untuk SMP.
- 14) Apabila seluruh komponen dalam dana BOS sudah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat yang dapat membantu kegiatan pembelajaran seperti alat peraga dan lain-lain.

Selanjutnya dana BOS tidak bisa digunakan pada semua kegiatan dan kebutuhan sekolah diantaranya sebagai berikut:

- (a) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan tujuan dibungakan.
- (b) Dipinjamkan kepada pihak lain.

- (c) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah misalnya studi banding, study tour (karya wisata), dan sejenisnya.
- (d) Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- (e) Membeli pakaian atau seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- (f) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
- (g) Membangun gedung atau ruangan baru.
- (h) Membeli bahan atau peralatan yang tidak membantu atau mendukung proses pembelajaran.
- (i) Menanamkan saham.
- (j) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh atau secara jar, misalnya guru kontrak atau guru bantu.<sup>35</sup>

#### **d. Teknik Pengelolaan Dana BOS**

Dana BOS dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan DanaBOS yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, danaBOS digunakan hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana. Prosedur pelaksanaan dana BOS diawali dengan proses pendataan pendidikan dasar, tahapan pendataan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan penyaluran dana BOS. Prosedur kemudian adalah proses penetapan alokasi dana BOS, persiapan penyaluran dana BOS di daerah, penyaluran dana BOS, dan pengambilan dana BOS. Adapun ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS sekolah adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Bonita Regina and Saleh Soeaidy, 'Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang', *Jurnal Administrasi Publik*, 3.1 (2020), 61–66.

1. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi atau persetujuan dari pihak manapun.
2. Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pengelolaan dana BOS juga memiliki ketentuan dalam pengelolaan dana BOS yaitu: Pemerintah daerah melakukan pengelolaan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengelolaan dana pada pemerintah daerah dilakukan oleh tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota; Tim BOS provinsi ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusan gubernur dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut: gubernur sebagai pengarah; penanggung jawab (sekretaris daerah provinsi sebagai ketua, kepala dinas pendidikan dan kepala dinas lain terkait/badan/biro pengelola keuangan daerah sebagai anggota); tim pelaksana terdiri atas sekretaris dinas yang menangani urusan pendidikan provinsi sebagai ketua pelaksana dan anggota (tim pelaksana SD dan SMP; SMA; SMK; SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB), penanggung jawab data (penanggung jawab data BOS SD dan SMP; SMA; SMK; SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB) dan pelaksana unit publikasi, layanan informasi atau humas.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis juknis dapat diberi sanksi hingga pemberhentian sementara penyaluran sementara dana BOS kepada sekolah terkait. Prosedur penggunaan dana BOS ini sudah diatur dalam masing-masing juknis. Dalam pengelolaan dana BOS wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut.

- a) Mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

- b) Melakukan evaluasi setiap tahun.
- c) Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dengan ketentuan RKAS disusun berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah, RKAS memuat penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS; dan harus disetujui dalam rapat Dewan Guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

#### **e. Perencanaan Pembiayaan Dana BOS**

Perencanaan adalah tahapan yang utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan untuk menentukan strategi, tujuan, standar operasional, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan meliputi penyusunan anggaran kebutuhan, analisis kebutuhan, penentuan skala prioritas dan pembagian tugas atau wewenang. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya perencanaan memegang peran yang lebih penting dibanding fungsi yang lain. Tanpa adanya perencanaan, maka akan sulit mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.<sup>36</sup>

Pemerintah pusat memiliki anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (39) mendefinisikan Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggakan melalui kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidikan, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap- tiap kegiatannya.

---

<sup>36</sup> Putri Kurniawati, *Perencanaan Pendidikan*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2021, h 46.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu.

1. Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
2. Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
3. Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.<sup>37</sup>

#### **f. Pembiayaan Dana BOS**

Implementasi adalah tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2008: 139) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

---

<sup>37</sup> Hanna Fadhila, *'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Education Financing Management to Improve the Quality of Education'*, 2021, 1-9.

kebijakan. Implementasi kebijakan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan diharapkan akan muncul apabila kebijakan tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Implementasi BOS merupakan suatu program dinamis, di mana pelaksanaan program harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Tahapan pelaksanaan harus dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya agar tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan bersama serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari dijalankannya program ini. Penggunaan dana BOS seluruhnya telah diatur di dalam Juknis BOS yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan setiap tahun. Pengelolaan dana BOS berkaitan erat dengan transparansi serta laporan pertanggung jawaban dana BOS. Tiap sekolah penerima dana BOS diwajibkan untuk membentuk Tim Manajemen BOS tingkat sekolah sebagai pihak-pihak yang diberikan mandat serta tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola dana yang diberikan untuk akhirnya dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan pesertadidik. Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah sendiri terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, serta Komite.

#### **g. Evaluasi Penggunaan Dana BOS**

Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas, baik dalam lingkup individu, kelompok, maupun lingkungan kerja. Tujuan dilakukannya evaluasi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan; Sebagai pengukur seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan; Untuk mengetahui masalah apa saja yang dialami seseorang dalam kegiatannya agar bisa dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedia teaching; Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil

keputusan di masa mendatang. Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi internal dan eksternal. evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota. Evaluasi internal bersifat klinis, yaitu melakukan evaluasi dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Evaluasi eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Evaluasi eksternal dilakukan oleh tim inspektorat yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi atau kegiatan yang menjadi obyek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh tim inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

1. Audit atau pemeriksaan

Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya di bidang keuangan maupun bidang teknis/operasional. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Inspektorat melakukan audit keuangan dan audit investigasi.

2. Survey

Survey dilakukan bersamaan dengan audit. Pemeriksaan atau audit tidak hanya dilihat dari laporan-laporan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwenang (sekolah), tetapi diperlukan pula adanya pemeriksaan langsung ke lapangan untuk melihat bahwa laporan yang dibuat tersebut memang benar adanya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan agar tujuan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat tersalurkan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional.

### 3. Riview

Review maksudnya adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada Inspektorat untuk diperiksa kembali dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Inspektorat dapat mengetahui setiap perolehan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disetiap sekolah.

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparatur pengawas melaksanakan pengawasan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif serta sikap disiplin yang tinggi. Hal ini dilakukan agar aparatur yang bekerja di instansi pemerintahan dapat melaksanakan tugas dan fungsi dari inspektorat dengan baik.<sup>38</sup>

#### **h. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu atau penelitian relevan merupakan penelitian yang telah ada sebelumnya. Pentingnya penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feiby Ismail dan Nindy Sumaila yang berjudul "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung". Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi manajemen

---

<sup>38</sup> Setiawati, Sri. "Evaluasi Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Menilai Efektifitas Dana." *Jurnal Lentera Akuntansi* Vol. 4, no. 2 (2019).

pembiayaan dalam pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung diwujudkan dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi proses pendidikan. Skripsi ini memiliki kesamaan penelitian yaitu Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif serta sama-sama meneliti pengelolaan Dana BOS di lembaga Pendidikan Islam, Fokus pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan (akutansi ), dan Pengawasan (audit). Adapun perbedaannya yaitu Objek penelitian di tingkat Madrasah Aliyah (MA), Cakupan wilayah berbeda, Bitung vs Bolaang Mongondow Timur. Penelitian terdahulu ini menekankan pada kendala dan solusi Implementasi Dana BOS yang lebih Kompleks karena tingkat sekolah yang lebih tinggi.

2. Artikel, Maisyatusyana yang berjudul “ Manajemen Keuangan Sekolah Tinjauan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) “.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pengertian dan tujuan manajemen keuangan sekolah, prinsip-prinsip manajemen keuangan, proses pengelolaan keuangan sekolah, dan pengelolaan dana BOS. Berlangsung, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan untuk peneliti sendiri melakukan di MIN 1 Boltim. Skripsi ini memiliki kesamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, serta sama-sama meneliti aspek keuangan pendidikan sebagai penunjang peningkatan mutu sekolah, sama-sama membahas pengelolaan anggaran sekolah dan peran kepala sekolah dalam manajemen. Adapun perbedaannya yaitu perbedaannya pada sisi topiknya lebih fokus terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun perbedaan lainnya terletak di tempat lokasi penelitian berlangsung, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan metode studi kepustakaan, sedangkan untuk peneliti sendiri dilakukan di MIN 1 Boltim.
3. Wasik Nur Mahmudah dan Mukhibat dengan judul Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Jogoroto Jombang. Skripsi ini memiliki kesamaan penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif dan observasi serta fokus pada efektivitas pengelolaan Dana BOS, sama-sama

melihat peran sekolah dalam menyusun RKAS dan melaporkan penggunaan dana, sama-sama meneliti proses manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun perbedaannya yaitu Objek penelitian Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Jogoroto Jombang Metode konvensional dengan menggunakan metode konvensional pada pesantren serta menekankan evaluasi efektivitas BOS dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, bukan hanya proses manajerialnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun tempat dan waktu penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur yang terletak di desa Bongkudai Kec. Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu bulan September 2024 sampai Januari 2025.

#### **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Karena tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan yang diterapkan sampai dengan proses pengontrolan pada program tersebut mencapai tujuan yang diinginkan.

Untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan menyeluruh diperlukan pendekatan kualitatif, sesuai dengan tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam–dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam–dalamnya pula guna menunjukkan pentingnya kedalaman dan detailnya suatu data yang diteliti. Dengan pendekatan ini gejala-gejala, informasi–informasi dapat diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan selama berlangsungnya proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dengan memposisikan peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive.

### **C. Sumber Data**

Data penelitian yang akan ditemukan dalam penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan Manajemen Pembiayaan di MIN 1 Bolaang Mongondow Timur. Maka adapun sumber data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data adalah sebagai berikut:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama.<sup>39</sup> Dalam penelitian yang merupakan sumber data primer yaitu kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur, Bendahara Umum, Bendahara BOS, Bendahara Komite.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dijadikan sebagai sumber tambahan seperti buku–buku, literatur, profil sekolah, dokumen–dokumen yang berkaitan Anggaran Pembiayaan di MIN 1 Bolaang Mongondow yaitu : profil sekolah, dokumen yang berkaitan dengan Pembiayaan Pendidikan, laporan tahunan sekolah.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya, pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

---

<sup>39</sup>Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pandiva Buku, 2016), h. 78.

### 1. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai.<sup>40</sup>

### 2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek kajian. Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>41</sup> Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui penerapan Manajemen di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan sejumlah data pendukung dalam penelitian.<sup>42</sup>Peneliti mengumpulkan data dan informasi pada latar permasalahan, Dokumentasi dapat berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, sertadokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>43</sup>

## **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini peneliti menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari pengamatan. karena instrumen penelitian ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mendapatkan data maka instrumen yang peneliti gunakan pada saat observasi yaitu:

---

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social Lainnya* (Kencana, Jakarta:2007), hal.115.

<sup>41</sup> Iqbal M Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia Indonesia, Bogor:2002), h. 86.

<sup>42</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2007), h. 161.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*: (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta;2010, h. 135.

### 1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara disusun dengan maksud agar wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti tetap akan fokus pada permasalahan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bolaang Mongondow Timur dan berkaitan dengan judul penelitian.

### 2. Transkrip wawancara

Transkrip Ini digunakan peneliti sebagai salah satu bentuk memaparkan hasil wawancara, serta pengumpulan pertanyaan peneliti dan menjawab dari informasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti serta berisikan data informasi yang diperoleh.

### 3. Perlengkapan wawancara

Perlengkapan wawancara yang digunakan peneliti yaitu berupa rekaman yang menggunakan handphone untuk merekam, buku dan pulpen untuk menulis serta serangkaian informasi dari informasi yang didapatkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan satu upaya untuk menata secara terstruktur data-data yang di dapatkan dari hasil observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan Untuk menafsirkan makna di balik data yang telah di peroleh pada saat penelitian.<sup>44</sup> Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis ini mencakup tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>44</sup> Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadhara: Jurnal Ilmu Dakwah 17, No 33, (2019), h.81.

## 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan pasti jumlahnya cukup banyak, untuk itu peneliti harus mencatat secara tetili dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Data yang direduksi dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bangun, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Adapun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan berupa data wawancara, data observasi, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* Terj. Tjetjep Rohendi Rohisi, (Universitas Indonesia, Jakarta:2007), h. 176-178.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang valid antara data yang terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan akan diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun teknik triangulasi yang paling digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin dalam Moloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi sumber data, yang dilakukan dengan cara mencari data dari banyak sumber informan yaitu orang yang terlibat langsung dengan objek kajian.
2. Triangulasi pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara mencari data dari beberapa informan. Seperti Kelapa Madrasah, Bendahara Komite, Bendahara Bos.
3. Triangulasi metode, mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan bermacam metode pengumpulan data (observasi, interview, study dokumentasi,).

*Sugiyono* menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.<sup>46</sup> Oleh karena itu, teknik triangulasi

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung:2013), h. 330.

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pengecekan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Data dari observasi dikonfirmasi melalui wawancara dan dokumentasi, data hasil wawancara dikonfirmasi melalui observasi dan dokumentasi, dan data dari dokumentasi juga dikonfirmasi dari wawancara dan observasi.

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, penulis hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.178.